

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Kajian penelitian terkait akulturasi Cap Go Meh di Kota Bogor akan dibedah dengan meninjau aspek-aspek teoritis dan konsep-konsep yang sesuai dengan tema penelitian. Penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran penelitian akan mempertajam eksplorasi penelitian. Empat landasan teori yang dipakai oleh peneliti yaitu teori budaya, teori akulturasi, teori identitas sosial dan teori perdamaian. Sementara itu budaya damai dan toleransi digunakan sebagai barometer kajian penelitian dan disempurnakan dengan kajian konsep pertahanan negara.

2.1.1 Teori Budaya

Secara etimologis, budaya berasal dari bahasa Sansekerta “buddyayah” yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti “budi” atau “akal”. Dalam bahasa Inggris, budaya diterjemahkan dalam kata *culture* yang diturunkan dari bahasa Latin *cultura*. *Cultura* diturunkan lagi dari kata *colere* yang artinya mengolah atau mengerjakan tanah. (Bagus, 2002). Dengan pendekatan etimologis maka secara sederhana budaya dapat diiterjemahkan sebagai hasil pengolahan budi manusia.

Melengkapi pemahaman di atas, Koentjaraningrat (2003) secara sederhana mendefinisikan budaya sebagai daya budi yang berupa cipta, karsa dan rasa sedangkan kebudayaan adalah hasil aktivitas (produk) daya budi tersebut. Lebih komprehensif bagi Koentjaraningrat, budaya diterjemahkan sebagai “keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar”. Kebudayaan semata-mata merupakan hasil kerja sama individu-individu dalam masyarakat/komunitas manusiawi. (Bagus, 2002)

Berdasarkan pendefinisian tersebut maka kita dapat melihat bahwa manusia memiliki tiga potensi dasar yaitu potensi cipta, rasa dan karsa.

Lewat potensi cipta manusia diberikan kemampuan dan akal untuk mengolah, membentuk, merumuskan, membangun segala sesuatu untuk membantu eksistensi hidupnya. Potensi rasa menjadikan manusia memiliki kemampuan untuk bisa mengalami dan mengungkapkan emosinya. Sementara ini melalui karsa, manusia diajak untuk memiliki dorongan atau hasrat untuk berkehendak.

Dalam definisi yang diungkapkan oleh Koentjaraningrat disebutkan pula bahwa budaya itu merupakan olah ketiga potensi manusia dalam kaitannya sebagai makhluk sosial. Budaya bukan soal kehidupan manusia personal tetapi selalu dalam hubungannya dengan manusia lainya dan bahkan dengan alam dan kekuatan di luar dirinya. Maka budaya tiada lain adalah bahasa kemanusiaan yang mendalam. Budaya menjadi sebuah identitas manusia sebagai makhluk individual dan sosial yang menjangkau waktu masa lalu, saat ini dan masa depan.

Dalam perspektif filosofis, Bagus (2002) memberikan sebuah pembedaan aktivitas budaya berdasarkan pada tujuan aktivitas tersebut yaitu aktivitas budaya personal dan aktivitas budaya material. Aktivitas budaya personal merupakan aktivitas kultural yang tertuju langsung pada pribadi manusia dan kesempurnaannya seperti bahasa, kehidupan komunitas, ilmu, dan moralitas. Sementara aktivitas budaya material mengarah pada objek-objek yang ada secara independen darinya seperti teknologi dan seni. Wujud aktivitas budaya yaitu ide-ide, aktivitas dan benda-benda hasil karya manusia. Secara lebih luas, akhirnya aktivitas budaya membentuk sebuah sistem yang disebut peradaban atau sivilasi.

Crowder dalam Bagus (2002) mendeskripsikan budaya sebagai rangkaian kepercayaan dan nilai yang dimiliki secara umum oleh suatu kelompok dan yang mencirikannya sebagai sebuah kelompok. Kental dalam penjelasan ini perihal nilai dan identitas. Maka aktivitas budaya manusia menunjukkan adanya nilai yang dipercayai, dihidupi dan dilestarikan sekaligus menjadi penanda identitas sosialnya. Sebuah nilai yang dihidupi terus menerus menunjukkan bahwa nilai tersebut telah

berurat berakar dalam perikehidupan masyarakat dan tidak terpisahkan. Lebih dari itu budaya pun akhirnya menjadi sebuah *style or way of life*.

Gagasan senada juga diajukan oleh Geertz (1992) yang melihat aktivitas budaya sebagai kerangka *belief* dan praksis dalam mana kelompok orang memahami diri mereka sendiri dan dunia sekitar mereka yang diatur baik personal maupun kolektif. Dengan penjelasan ini maka aktivitas budaya memiliki peranan untuk membentuk identitas dan komunal. Aktivitas budaya memberi penegasan hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Pada sisi yang sama, aktivitas budaya juga mengajak manusia terbuka melihat yang lain, di luar dirinya. Pemahaman akan yang lain tiada lain menunjukkan bahwa aktivitas budaya itu sifatnya terbuka. Keterbukaan ini menjadi kunci utama agar manusia tidak egosentris tetapi terbuka terhadap dunia sekitar.

Aktivitas budaya senantiasa melibatkan tiga wujudnya (ide, aktivitas, produk budaya) ke dalam sebuah sistem yang kompleks dan tidak terpisahkan (Koentjaraningrat, 2003). Kita cermati lewat adat istiadat sebagai sebuah contoh pertemuan tiga wujud budaya tersebut, agar kita lebih mudah memahami konsep ini. Adat istiadat merupakan sebuah sistem nilai-nilai hidup yang menuntun pola perilaku manusia (ide). Nilai-nilai ini dihidupi dalam sebuah interaksi manusia dengan sesamanya, manusia dengan lingkungannya dan manusia dengan Yang Ilahi (aktivitas). Perayaan ritual, penghormatan dan pelaksanaan terhadap hukum-hukum dan nilai-nilai adat merupakan hasil akhirnya (produk budaya).

Aktivitas dari ide yang ditampilkan dalam nilai-nilai keutamaan hidup ini diwujudkan pula dalam produk-produk budaya misal bentuk rumah, pakaian, karya seni dan lain-lain sebagai bentuk ekspresi budaya dan sekaligus sebagai media untuk memberikan inspirasi yang mengingatkan pada sistem nilai dan aktivitas kepada setiap orang (dan generasi) yang melihatnya. Budaya pun menjadi tali pengikat identitas antar generasi. Itulah sebabnya budaya dapat diwariskan dan dihidupi ketiga tiga wujud ini tidak dihilangkan. Maka pemilikan budaya hanya

dapat diperoleh melalui sebuah usaha yang keras dan berkesinambungan. Dengan kata lain dapat dikatakan pula bahwa budaya itu dapat dipelajari sekaligus bisa punah ketika tidak ada yang melanjutkan.

Karakteristik budaya pada akhirnya selalu mengarahkan manusia untuk melihat dirinya (aku), komunitasnya (kami) dalam keterhubungan dengan yang lain (dia dan mereka) demi keselarasan harmoni (kita). Oleh karena itu budaya pun perlu dirayakan sebagai media untuk kembali mengakarkan identitas pada generasi-generasi berikutnya. Di dalam budaya manusia merayakan, melestarikan dan mewariskan nilai-nilai (values) hidup.

2.1.2 Teori Akulturasi

Teori akulturasi (acculturation theory) menjadi salah satu teori yang sangat penting untuk menjelaskan budaya dalam perspektif multikulturalisme. Interaksi beragam budaya mendorong sebuah respon yang sangat variatif. Dalam teori budaya disinggung salah satu karakteristik budaya yaitu keterbukaan. Akulturasi secara sederhana dapat dikatakan sebagai bentuk keterbukaan budaya dalam interaksi dengan segala elemen di sekitarnya.

Akulturasi, oleh Smith dan Guerra (sebagaimana dikutip dalam Smokowski, David-Ferdon, & Stroupe, 2011, p. 3), diartikan sebagai “the differences and changes in values and behaviors that individuals make as they gradually adopt the cultural values of the dominant society”. Dalam gagasan ini akulturasi dipahami sebagai sebuah proses adopsi nilai-nilai dan perilaku dari kaum mayoritas. Dalam sebuah masyarakat multikultural, dinamika pengadopsian nilai-nilai dan pola perilaku tidak bisa terhindarkan. Persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana proses adopsi tersebut berangsur. Ukuran kelayakan sebuah nilai dan perilaku untuk diadopsi tentunya harus melalui proses pemikiran dan evaluasi yang matang agar sesuai dan cocok dengan nilai-nilai dan identitas asli.

Redfield, Linton dan Herskovits (sebagaimana yang dikutip dalam Sam, 2006, p. 11) lebih menggarisbawahi akulturasi sebagai hasil interaksi sosial yang berkesinambungan. Mereka menyatakan bahwa akulturasi adalah “those phenomena which result when groups of individuals having different cultures come into continuous first-hand contact, with subsequent changes in the original culture patterns of either or both groups”. Dalam gagasan ini penting dicatat bahwa sebuah akulturasi menunjukkan adanya sebuah temporal waktu yang tidak sebentar. Maka ketika berbicara mengenai akulturasi, sebuah nilai aktivitas budaya dari aktivitas budaya yang lain masuk memberikan pengaruh ketika ada sebuah proses interaksi sosial masyarakat yang lama dan mendalam. Aktivitas budaya asli mendapatkan bentuknya yang lain karena adanya interaksi dengan budaya-budaya sekitar dalam sebuah kontinuitas temporal. Bukan hal mudah untuk proses ini karena pada hakikatnya sebuah identitas baik individu maupun kelompok terlebih identitas budaya senantiasa berkecenderungan untuk mempertahankan dirinya. Oleh sebab itulah proses akulturasi senantiasa memerlukan sebuah proses dan waktu yang lama.

Dari dua definisi teori akulturasi tersebut, dapat digarisbawahi jika proses akulturasi terjadi secara bertahap (gradual) dan berkelanjutan (continuous), yang mengindikasikan bahwa interaksi haruslah terjadi selama periode waktu tertentu sehingga dapat menghasilkan perubahan. Interaksi ini mensyaratkan adanya sebuah proses adaptasi dan adopsi sejauh tidak saling bertentangan. Maka akulturasi lebih mengedepankan mencari persamaan-persamaan dan kesetaraan dalam sebuah keberbedaan dan keberagaman.

Terkait dengan adaptasi, Ward et al (dalam Sam, 2006), membagi adaptasi menjadi dua jenis yaitu adaptasi psikologis dan adaptasi sosiokultural. Adaptasi psikologis mengacu pada kesejahteraan emosional dan kepuasan sedangkan adaptasi sosiokultural berkaitan erat dengan perolehan keterampilan secara budaya yang diperlukan dalam bernegosiasi, berhubungan, serta dalam memasuki lingkungan sosial atau

budaya lainnya (dalam Sam, 2006, p. 17). Dari gagasan ini hendak ditunjukkan bahwa akulturasi membawa sebuah perubahan baik ditingkat individu maupun sosial. Akhirnya akulturasi dilihat sebagai sebuah perkembangan sosiokultural.

Akulturasi akhirnya dapat dikatakan sebagai sebuah proses adaptasi untuk meminimalisir konflik dalam interaksi sosial budaya yang multikultural. Gagasan ini selaras dengan teori akulturasi yang dikemukakan John W. Berry (Chun, 2010). Untuk tujuan tersebut, Berry memberikan sebuah konseptualisasi akulturasi dalam tiga model yaitu penyesuaian (*adjustment*), reaksi (*reaction*), dan penarikan (*withdrawal*). Kontak menjadi konsep utama dalam proses adaptasi menurut Berry. Sebagai tambahan, Berry kemudian juga menyajikan dua dimensi dasar dalam akulturasi, pertama untuk memelihara identitas budaya asli, kedua untuk memelihara hubungan dengan kelompok-kelompok lainnya (Chun, 2010).

Secara sederhana, akulturasi mencakup semua perubahan yang muncul setelah adanya kontak antara individu dan kelompok dengan latar belakang budaya yang berbeda (Sam, 2006). Akulturasi memungkinkan terciptanya keharmonisan sosial di antara kalangan yang multietnis dan multireligius karena interaksi yang terjalin didasarkan pada sikap saling menghormati. Selain itu, di dalam proses akulturasi juga terjadi integrasi-integrasi subkultur budaya dan penyesuaian terhadap nilai-nilai yang dianut (sebagai bentuk tindakan adaptif terhadap aktivitas budaya lainnya) sehingga kemungkinan terjadinya benturan dapat diminimalisir atau dihindari. Adapun bentuk yang paling tinggi dari akulturasi adalah asimilasi, yang mampu melahirkan bentuk aktivitas budaya baru serta menghilangkan bentuk budaya asli yang ada.

2.1.3 Teori Identitas Sosial

Teori identitas sosial memiliki peranan penting dalam menganalisa kondisi masyarakat multikultural. Secara umum dalam teori identitas sosial penekanannya adalah mengamati identitas seorang pribadi yang

tergabung dalam sebuah kelompok sehingga menimbulkan pemisah yaitu kami dan mereka. Kelompok dalam mana seorang pribadi bergabung di dalamnya memberikan bermacam emosional personal dan kolektif (rasa bangga, nyaman dan solidaritas) dan harga diri. (Hogg dan Abram, 1988 p.45)

Tokoh yang paling banyak mendalami teori identitas sosial adalah Henri Tajfel dan John Turner. Tajfel dan Turner (sebagaimana dikutip dalam Malik, 2017, p.11) menyatakan bahwa hubungan antar kelompok harus dilihat dari sudut pandang kelompok dan bukan dari sudut pandang pribadi. Ketika seorang pribadi ada dalam kelompok, rasa bangga, harga diri, solidaritas meningkat dan bahkan bisa juga sebaliknya tergantung citra kelompok tersebut dalam pandangan orang / kelompok lain. Contoh sederhana ketika dua kelompok bertanding dalam sebuah kompetisi olahraga. Seorang pribadi yang menjadi anggota kelompok pemenang akan merasa bangga ketika kelompoknya juara meskipun ia tidak ikut bertanding. Demikianpun sebaliknya.

Tiga mekanisme psikologis yang mendasari teori identitas sosial (Tajfel dan Turner, 1986, p.7-24) yaitu :

1. *Social Categorization*

Dalam bagian ini terdapat proses kategorisasi berdasarkan kesamaan-kesamaan tertentu. Kesamaan inilah yang menjadi pengikat diantara anggota kelompok. Tentunya dalam proses ini kecenderungan untuk mencari persamaan sebesar-besarnya dalam kelompok menjadi lebih dominan dan sekaligus mencari perbedaan-perbedaan dengan kelompok lain. Dengan kata lain dalam proses ini pula dikotomi dan pengkotak-kotakan semakin terbuka lebar. Dalam proses ini “prototype” menjadi hasil akhirnya.

2. *Social Comparison*

Seiring dengan proses pemantapan identitas kelompoknya, aktivitas membandingkan kelompok dengan kelompok yang lain pun tidak bisa terpisahkan. Dalam aktivitas ini, kecenderungan

untuk melihat kekurangan kelompok lain, merendahkan kelompok lain dan mungkin pula membuat prasangka mudah terjadi. Dalam proses ini “stereotype” menjadi hasil akhirnya.

3. *Positive Distinction*

Dalam tahap ini dijumpai adanya keinginan untuk mengunggulkan kelompok. Proses ini tentunya semakin memperkuat dikotomi dan melihat kelompok lain dari sudut-sudut yang lebih negatif. *Ethnocentrism, ingroup favouritism, stereotypical thinking* dan *conformity to ingroup norms* menjadi hal yang dilakukan dalam bagian ini.

Identitas menjadi ciri yang merepresentasikan klasifikasi masyarakat berdasarkan kategori-kategori pemisah; membangun pola perilaku baik secara personal maupun komunal. Identitas terbentuk ketika adanya pengakuan bahwa dia termasuk ke dalam suatu kelompok atau kategori sosial. Kelompok sosial sendiri merupakan sekumpulan orang yang memandang diri mereka sebagai orang yang berada dalam kategori sosial yang sama dan memegang teguh nilai-nilai sosial yang sama (Stets and Burke, 2000, p. 224-225).

Teori identitas sosial dalam kerangka memahami masyarakat multikultural menjadi sangat relevan. Pola pikir, perilaku dan emosional akan dapat dianalisa berdasarkan teori ini. Salah satu produk dari multikulturalisme adalah adanya dikotomi mayoritas dan minoritas. Dalam konteks besar sebagai sebuah negara (nation), adanya cara berpikir mayoritas dan minoritas melahirkan stereotipe, diskriminasi dan bahkan melahirkan nasionalisme sempit.

2.1.4 Teori Perdamaian

Johan Galtung yang dikenal sebagai pendiri ilmu dan penelitian perihal perdamaian, dalam buku *Handbook of Peace and Conflict Studies* (2007) mendefinisikan damai dalam dua rupa : *negative peace* (damai negatif) dan *positive peace* (damai positif). Dalam kerangka *negative peace*, damai ditandai dengan tidak adanya peperangan (*absence of war*)

dan tidak adanya konflik-konflik dalam rupa kekerasan dan perselisihan. Secara lebih mendalam damai tidak diukur dengan ada atau tidaknya sebuah konflik atau kekerasan. *Positive peace* mendefinisikan wajah damai secara lebih mendalam dalam hal ini. Damai dipahami sebagai sebuah kondisi sosial masyarakat yang mengandung nilai-nilai penghargaan, penghormatan, kerja sama, harmoni, keadilan dan dialog. Dalam *positive peace* kental sekali adanya keutamaan nilai-nilai yang positif yang diunggulkan.

Tabel 2.1 Tabel Perbandingan *Positive Peace* dengan *Negative Peace*

MAP 16.4: Violence and Peace: Direct, Structural and Cultural

Violence	Direct = harming, hurting	Structural = harming, hurting	Cultural = justifying violence
Negative peace	[1] absence of= ceasefire	[2]absence of= no exploitation; or structure= <i>atomie</i>	[3] absence of= no justification; or culture= <i>anomie</i>
Positive peace	[4] presence of= cooperation	[5] presence of= equity, equality	[6] presence of= culture of peace, and dialogue
Peace	negative + positive	negative + positive	negative + positive

Sumber : Handbook of Peace and Conflict Studies, Webel & Galtung, Routledge (2007)

David P. Barash dan Charles P Webel (2009) menjelaskan konsep damai dari sudut pandang para filsuf, agamawan dan budayawan. Ternyata konsep damai lebih banyak mengarahkan pada tendensi *positive peace*. Dalam tradisi China, misalnya, kata *heping* menunjuk pada dunia yang damai; damai di antara bangsa-bangsa. Sementara kata *an* dan *mingsi* menunjuk pada kedamaian batiniah (inner peace); sebuah kondisi batin yang tenang dan damai melalui jalan meditasi. Damai lebih selalu memperlihatkan dua dimensi yaitu di dalam batin (*inner*) dan kondisi luarannya (*outer*).

Dalam kamus *Webster's Third New International Dictionary* kata damai (peace) didefinisikan ke dalam tiga tingkatan. Pada tahap pertama, damai sebagaimana yang dikonsepsikan Galtung dalam damai negatif dan

positif diterjemahkan sebagai kondisi bebas dari sebuah kebingungan (damai negatif) dan kondisi aman yang terlindungi hukum, adat dan opini publik (damai positif). Pada tahap pertama ini damai kental dengan nuansa politis. Definisi kedua, damai diartikan sebagai sebuah kondisi mental dan spiritual yang ditandai dengan tidak adanya tekanan dari pihak lain. Damai ditandai dengan ketenangan hati dan pikiran. Damai dalam pengertian ini karakteristiknya sangat personal. Ketiga, damai diartikan sebagai sebuah kemenangan atas segala gangguan dan terakhir damai diartikan sebagai harmoni dalam hubungan personal manusia yang sarat dengan nilai penghargaan diri. Pada pengertian yang terakhir ini, damai mendapatkan karakteristiknya sebagai *interpersonal* atau *intersubjective peace*.

Kembali kepada konsep damai yang digagas oleh Galtung, konsep damai negatif menunjukkan tidak adanya perang dan konflik apapun. Dalam konsep ini yang ingin ditonjolkan adalah sebuah kondisi yang terhindar dari sebuah aksi kekerasan yang aktif dan terencana. Damai dalam tahap ini menandai adanya sebuah tekanan sosial dan politis; terkait dengan kekuasaan. Sementara itu damai positif mengarahkan pandangan pada sebuah kondisi sosial yang minim bahkan mengeliminir eksploitasi. Dengan kata lain dalam damai positif eksistensi hukum sosial sebagaimana keharmonisan alam lebih mendominasi.

Dalam penjelasan lebih lanjut, Galtung mengetengahkan perihal kekerasan struktural (*structural violence*). Kekerasan struktural ini umumnya muncul dalam bentuk struktur sosial, kultural dan institusi ekonomi (David & Charles, 2009). Dampak dalam kekerasan struktural ini adalah adanya penolakan dan penindasan terhadap hak-hak masyarakat, misalnya : hak berekspresi, kesenjangan politik dan ekonomi, gender, kesempatan bekerja, kelaparan, intoleransi, radikalisme, dan gerakan anti etnis tertentu, dan sebagainya. David dan Charles (2009) menekankan bahwa kekerasan struktural merupakan bentuk serius dari tekanan sosial. Kekerasan struktural menjadi sebuah tantangan yang mendalam dalam menciptakan situasi dan kondisi damai.

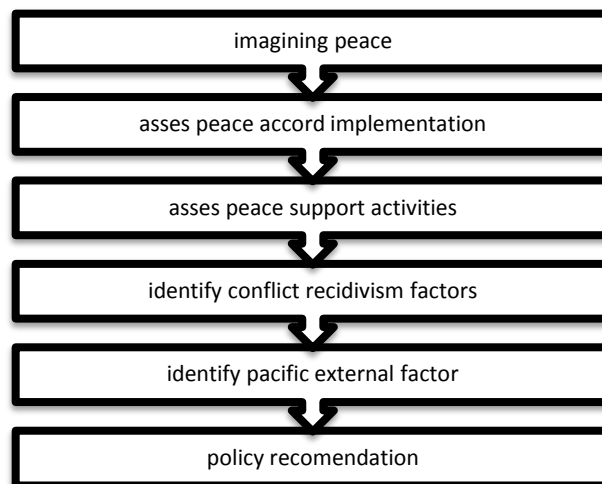
Dalam sejarah bangsa-bangsa , konsep damai mengarahkan pada sebuah pencapaian damai positif daripada damai negatif. David dan Charles (2009) memberikan sejumlah contoh perihal konsep damai yang terwakili dalam kosakata bahasa beberapa budaya besar di dunia. Kata damai yang dipakai pada beberapa suku bangsa memberikan sebuah wawasan yang mengarah pada kondisi damai positif. Yunani Kuno memiliki kata *eireinei* yang artinya harmoni dan keadilan sebagaimana sebuah kondisi damai. Arab memiliki kata *salam* dan Ibrani kata *shalom* yang artinya harmoni bukan hanya pada diri sendiri tetapi dalam komunitas, semua orang dan segala bangsa. Sansekerta yang memiliki kata *shanti* yang bukan hanya menunjuk pada sebuah kondisi damai akan tetapi sebuah lompatan spiritual, pencapaian sebuah keseimbangan hati dan budi, integritas antara pikiran dan tindakan. China memiliki kata *ping* yang artinya harmoni dalam keberagaman. Rusia memiliki kata *mir* yang artinya damai pada sebuah komunitas desa dan seluruh dunia.

Damai negatif atau secara sederhana diterjemahkan sebagai nir kekerasan dan perang umumnya dijumpai dalam ranah diplomasi; dalam ranah *peacekeeping*. Hal ini bisa kita lihat misalnya pada daerah-daerah konflik. Masyarakat daerah konflik merindukan damai pertama-tama adalah pada berakhirnya sebuah perang dan pertikaian. Damai berkaitan erat dengan keamanan (*security*). Sebaliknya, damai positif dijumpai dalam *peacebuilding*, dalam sebuah transformasi konflik yang mengarahkan sebuah kondisi masyarakat yang bebas dari penindasan struktur sosial dan kekerasan struktural. Dengan kata lain pencapaian damai negatif lebih konservatif karena hanya menjaga kondisi sebagaimana semestinya sementara damai positif justru menumbuhkan hal-hal baru yang sebelumnya belum tumbuh. Maka dari itu bentuk damai positif akan terasa lebih kompleks dan berat sehingga menuntut pula sebuah upaya yang tidak mudah untuk mencapainya. (David dan Charles, 2009)

Pertanyaan berikut yang dapat diajukan adalah bagaimana menciptakan kondisi damai? Perdamaian itu butuh sebuah proses maka

dari itu perdamaian pun memerlukan langkah-langkah pencapaiannya. Roger Mac Ginty (dalam David dan Charles, 2009) memberikan sebuah kerangka pencapaian damai secara struktural yang disebutnya *critical peace assesment model*. Kerangka ini akan membantu dalam menilai sebuah kondisi damai terlebih dalam sebuah komunitas masyarakat plural.

Tabel 2.2 Kerangka Pencapaian Damai secara Struktural



Sumber : Critical peace assesment model, Roger Mac Ginty (2009).

Rummel pun memberikan sebuah gagasan perihal langkah-langkah yang diperlukan dalam pencapaian kondisi masyarakat damai pada masyarakat plural. Konsep ini semakin melengkapi peneliti dalam menilai kondisi damai pada lokus penelitian yang ditargetkan. Lewat model yang diberikan oleh Rummel syarat tercapainya damai pada sebuah komunitas masyarakat yang plural adalah adanya sebuah perubahan dan peleburan komunitas masyarakat dari yang fanatik.

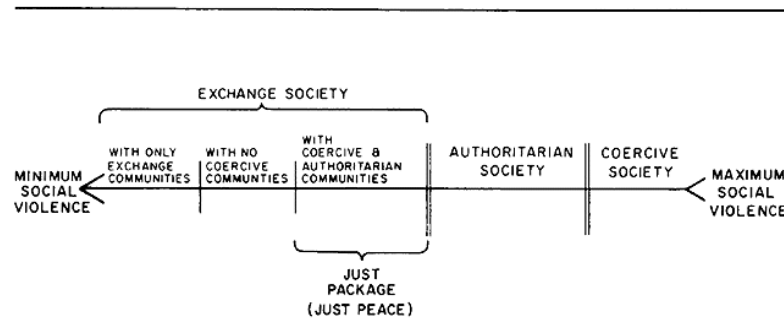


Figure 8.2: The Relationship of the Just Package (Peace) to Social Violence

Gambar 2.1 Kerangka Pencapaian Damai Pada Masyarakat Plural

Sumber : R. J Rummel, Just Peace (1981)

Dari teori damai beserta dengan segala indikator dan langkah-langkahnya, maka semua deskripsi di atas akan sangat membantu peneliti dalam membandingkan antara teori dengan peristiwa dan kenyataan yang terjadi di lapangan nanti.

2.1.5 Budaya Damai

Budaya damai adalah sebuah sikap dan cara hidup yang menyebabkan seseorang mampu melakukan kebaikan yang paling tinggi. Deklarasi PBB (1998) menyatakan: budaya damai adalah seperangkat nilai, sikap, tradisi, cara-cara berperilaku dan jalan hidup yang merefleksikan dan menginspirasi:

1. Respek terhadap hidup dan hak asasi manusia
2. Penolakan terhadap semua kekerasan dalam segala bentuknya dan komitmen untuk mencegah konflik kekerasan dengan memecahkan akar penyebab melalui dialog dan negosiasi
3. Komitmen untuk berpartisipasi penuh dalam proses pemenuhan kebutuhan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang
4. Menghargai dan mengedepankan kesetaraan hak dan kesempatan bagi kaum perempuan dan laki-laki
5. Penerimaan atas hak-hak asasi setiap orang untuk kebebasan berekspresi, opini dan informasi

6. Penghormatan terhadap prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, demokrasi, toleransi, solidaritas, kerjasama, pluralisme, keanekaragaman, budaya, dialog dan saling pengertian antar bangsa-bangsa, antar etnik, agama, budaya, dan kelompok-kelompok lain dan serta individu- individu.

Assegaf (2000) mendefinisikan budaya damai serupa dengan penjelasan dari PBB, sekumpulan nilai, sikap, tradisi, aturan, perilaku dan gaya hidup yang didasarkan pada sembilan hal yaitu :

1. Penghormatan atas kehidupan
2. Penghormatan terhadap sistem kekuasaan sesuai dengan hukum internasional
3. penghormatan hak asasi manusia
4. komitmen menyelesaikan konflik secara damai
5. berupaya memenuhi kewajiban pembangunan dan terkait dengan generasi mendatang
6. menghargai dan meningkatkan hak untuk pembangunan perdamaian
7. mengharga dan meningkatkan persamaan hak dan peluang bagi laki-laki dan perempuan
8. menghargai dan meningkatkan kebebasan menyatakan informasi
9. mengikuti prinsip keadilan, kebebasan, demokrasi, toleransi, solidaritas, pluralisme, keberanekaragaman budaya, dialog dan pemahaman pada semua tingkat masyarakat.

Dalam penjelasannya, secara eksplisit Assegaf menyebutkan adanya komitmen untuk menyelesaikan konflik secara damai.

Secara lebih tegas, budaya damai diterjemahkan oleh tim perumus Komisi Keadilan dan Perdamaian Konferensi Waligereja Indonesia (KWI, 2001) sebagai sebuah kenyataan hidup yang harus yang harus dihayati dan dijamin oleh setiap orang. Di sini budaya damai dilihat sebagai sebuah pandangan hidup yang dipraktekkan dalam berbagai level relasi di dalam masyarakat. Sasaran utama dari praktek hidup yang dilandasi

budaya damai adalah terciptanya damai yang abadi dan lestari (sustainable peace).

Beberapa catatan tambahan yang dijelaskan dari Komisi Keadilan dan Perdamaian (KWI, 2001) mendeskripsikan situasi dan kondisi damai yaitu :

1. damai adalah ketenangan batin, rasa tenteram dan sejahtera
2. damai adalah harmoni dan kerja sama
3. damai adalah kenyataan di mana semua orang mengalami keadilan dan kewajaran dalam masyarakat
4. damai adalah situasi di tengah masyarakat di mana konflik diselesaikan tanpa kekerasan dan apabila ada langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan dasar orang secara masuk akal dan wajar.

Komisi keadilan dan perdamaian KWI secara tegas dan lugas memberi artian damai sebagai sebuah proses untuk mengejawantahkan keadilan. Dalam keadilan maka hak-hak asasi manusia dan kebebasannya harus dapat dinikmati semua orang tanpa adanya pembedaan. Di sinilah akhirnya kita melihat bahwa upaya perdamaian tiada lain adalah upaya membangun relasi pribadi, kelompok dan lembaga (sosial, politik, ekonomi, kebudayaan dan pendidikan) yang memajukan kesejahteraan dan pengembangan semua orang, sambil memperkaya inti budaya dari setiap individu dan masyarakat. (KWI, 2001)

Ada dua syarat terwujudnya budaya damai yaitu suasana yang memungkinkan dan kesinambungan proses (KWI, 2001). Suasana yang memungkinkan adalah sebuah kondisi di mana tidak adanya prasangka-prasangka negatif atau buruk terhadap pihak lain dan adanya penyembuhan penyembuhan luka-luka lama masa lalu yang mungkin pernah terjadi. Sering kali prasangka menjadi sebuah hambatan besar dalam menjalin keterbukaan terhadap orang lain dan ironisnya prasangka ini tidak disertai upaya yang benar untuk mencari kebenaran informasi. Maka dari itu mutlak dituntut adanya upaya penyadaran atas segala prasangka negatif yang selama ini dihidupi.

Syarat kedua mewujudkan budaya damai adalah proses yang berkesinambungan. Dalam proses ini terkandung nilai-nilai mulia seperti pengakuan terhadap martabat dan persamaan manusia, tenggang rasa satu sama lain, saling menerima dan saling menghargai. (KWI, 2008). Dengan demikian mewujudkan budaya damai merupakan sebuah proses dan realitas yang harus terus dihidupi dan tidak akan berhenti sepanjang manusia masih hidup.

Dalam wajah multikulturalisme, membangun budaya damai selalu dihadapkan pada benturan-benturan yang kadang tidak mudah ditangani. Meski demikian, memperjuangkan dan melestarikan budaya damai jangan sampai terabaikan dan bahkan tidak boleh dipandang sebelah mata. Perlu kerja keras, komitmen serta partisipasi semua elemen masyarakat dan bangsa untuk mewujudkannya.

Budaya damai sebagaimana yang dijelaskan di atas menjadi sebuah medan analisis peneliti dalam kajian akulturasi dan perayaan Cap Go Meh pada masyarakat Bogor. Masyarakat kota Bogor juga tumbuh dalam wajah multikulturalisme. Bahkan nama Bogor sendiri pada zaman kolonial disebut dengan nama *buitenzorg* yang artinya tenang dan sejuk. Bukan hanya terkait dengan topografi Bogor yang sejuk tetapi ketenangan dan kesejukan identik pula dengan kondisi sosial (demografi) yang damai. Sejauh manakah budaya damai di Bogor dikembangkan serta apa saja perangkat-perangkat masyarakat dan hukum yang menyuburkan upaya-upaya membangun budaya damai menjadi sebuah eksplorasi penelitian yang sungguh menantang.

2.1.6 Toleransi

Dalam Kamus Filsafat (Bagus, 2002) toleransi berasal dari bahasa Yunani, *tolerare*, yang artinya tahan, kelonggaran, kelembutan hati dan kesabaran. Toleransi diartikan sebagai sikap seseorang yang bersabar terhadap keyakinan filosofis dan moral orang lain yang dianggap berbeda, dapat disanggah, atau bahkan keliru. Sikap ini hendak menekankan nilai penghargaan dan hormat pada berbagai keyakinan bahkan bersebrangan.

Dengan sikap ini orang bukan berarti hendak menutup mata dan tidak peduli. Pada kesempatan yang sama orang pun bahkan tidak mencoba membinasakan ungkapan-ungkapan dan nilai-nilai keyakinan orang lain yang berbeda tersebut. Ada semacam keterbukaan terhadap kebenaran dan kebaikan pada keyakinan orang lain tanpa berusaha untuk setuju pada keyakinan-keyakinan tersebut.

Dalam masyarakat modern, toleransi didasarkan pada rasa hormat pada kebebasan dan martabat orang lain. (Bagus, 2002). Hal ini senada dengan seruan UNESCO ketika diadakan pembicaraan internasional di Paris pada tahun 1999 perihal “ Towards a Constructive Pluralism” (Kristiyanto, 2014). Dalam pembicaraan tersebut dihasilkan empat rekomendasi yang bernuansa toleransi; ajakan dan dorongan untuk saling menghargai dan memberi ruang untuk pengembangan-pengembangan sosio kultural yang positif. Secara lebih jelas rekomendasi itu dijelaskan dalam empat point berikut ini:

1. Penekanan pada aspek-aspek tradisi yang mampu mendorong semua kelompok religius, etnis, bahasa dan latar belakang lainnya untuk bisa saling menghargai dan mengerti;
2. Pemberian bantuan jika diperlukan bagi individu atau kelompok untuk identitas mereka yang tergusur migrasi dan urbanisasi;
3. Pengembangan proses pendidikan yang mendukung interaksi dan mendorong sikap saling menghargai antarkomunitas;
4. Pembukaan ruang dialog pluralisme pada kaum akademisi, perancang kebijakan dan mereka yang terjun di lapangan

Penting dicatat di sini bahwa toleransi memerlukan sebuah proses dialog. Dialog menjadi kunci utama dalam membangun sikap mau mendengarkan dan mengerti keyakinan pihak lain. Dalam konteks multikulturalisme, membangun sebuah dialog yang sehat dan transformatif menjadi sebuah keharusan dalam kerangka menciptakan sikap toleransi menuju sebuah kedamaian yang positif. Dialog akan membuka cakrawala wawasan dan pandangan secara lebih luas. Pemahaman yang sempit dan keliru dan sikap tidak mau tahu justru menjadi sumbatan dalam membuka

ruang dialog sehingga toleransi terasa seperti peribahasa jauh api dari panggang.

Dasar lain dari toleransi adalah fakta universal bahwa manusia tidak terlepas dari kesalahan dan kekeliruan, bukan hanya secara individual tetapi juga secara komunal. Terkait dengan hal ini maka rekonsiliasi menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat terpisahkan dalam membangun toleransi.

Casram (2016) dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul “Membangun Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural” mengutip ungkapan yang digagas oleh Mukti Ali yaitu *Agree in Disagreement*. Ungkapan ini menjadi motto pamungkas dalam upaya mendorong tumbuhnya sikap toleransi. Toleransi harus ditumbuhkan oleh kesadaran yang bebas dari segala macam bentuk tekanan atau pengaruh serta terhindar dari hipokrisis. Toleransi mengandung maksud untuk memungkinkan terbentuknya sistem yang menjamin keamanan pribadi, harta benda dan unsur-unsur minoritas yang terdapat dalam masyarakat.

Ada dua bentuk toleransi yang diajukan oleh Casram yaitu toleransi pasif dan toleransi aktif. Toleransi pasif adalah sebuah sikap toleransi yang lebih terkesan semacam sikap pembiaran; menerima perbedaan sebagai sesuatu yang bersifat faktual. Sementara toleransi aktif adalah sebuah sikap toleransi yang mendorong orang untuk ikut terlibat dalam interaksi dengan yang lain di tengah perbedaan dan keberagaman. Hakikat toleransi adalah hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai dalam perbedaan dan keberagaman. (Casram, 2016).

Berhadapan dengan membangun jembatan dialog demi terwujudnya damai dan toleransi tentu tidak mudah. Kenyataan faktual yang dihadapi pertama adalah heterogenitas masyarakat dalam latar belakang dan pendidikan. Hal ini penting karena terkait dengan cara memberikan pemahaman bagi masyarakat *well educated* dan masyarakat biasa tentu akan menjadi sebuah kendala tersendiri. Dialog dan toleransi yang diharapkan akan menjadi efektif ketika dialog ini melibatkan para

tokoh kunci dan panutan yang mewakili masing-masing *segmen* dalam dinamika multikulturalisme.

Toleransi sangat dibutuhkan untuk menciptakan keseimbangan dan kohesi sosial dalam masyarakat multikultural. Untuk menciptakan sikap toleransi beragama yang proposional dalam masyarakat multikultural perlu menumbuhkan sikap *epoché* yaitu sebuah sikap tidak mudah tersinggung dan marah ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang berbeda dengan keyakinan nilai-nilai yang kita anggap benar. (Casram, 2016). *Epoché* pada mulanya digunakan oleh aliran Pyrrhonisme, yakni aliran filsafat Yunani sekitar abad 272 SM, untuk mengungkapkan keraguan dalam ilmu pengetahuan, sehingga pendiri aliran fil-safat tersebut, Pyrrhon, dianggap sebagai pendiri skeptisisme kuno Yunani.

2.1.7 Pertahanan Negara

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 menuliskan “Pertahanan negara diselenggarakan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”. Pentingnya upaya penyelenggaraan pertahanan negara ini terkait dengan lingkungan strategis yang dinamis dewasa ini. Ancaman terhadap keutuhan dan keselamatan bangsa semakin kompleks : ancaman militer, ancaman non militer dan ancaman hibrida. (Kemenhan, 2008).

Indonesia yang menganut sistem pertahanan negara yang bersifat semesta mengajak semua komponen bangsa dan potensinya untuk bersinergi bersama dalam upaya penyelenggaraan pertahanan negara yang kuat dan mantap. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 menuliskannya demikian: “Sistem pertahanan negara bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk

menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman”.

Pembangunan pertahanan negara diselenggarakan dalam keterpaduan antara pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter dalam rangka menghadapi ancaman, baik ancaman militer, nonmiliter maupun hibrida. (Kemhan, 2008). Seiring dengan konsep dan tujuan pertahanan negara tersebut maka sebagai bagian dari partisipasi penyelenggaraan pertahanan negara dalam upaya menciptakan keutuhan bangsa dan keselamatannya dengan segala ancamannya, salah satu kekuatan yang bisa dibangun masyarakat adalah kekuatan pertahanan nirmiliter.

Upaya pembangunan pertahanan negara tetap bersandar pada nilai-nilai idiologi dan budaya yang dihayati dan dihidupi sebagai identitas bangsa. Pembangunan pertahanan negara melalui sektor budaya dan agama menjadi sebuah aspek penting dalam menghadapi ancaman-ancaman budaya dan idiologi yang masuk ke Indonesia yang tidak sesuai dengan identitas bangsa. Pada sisi lain, interaksi budaya dan agama (multikulturalisme) hendaknya diupayakan semakin memperkokoh integrasi bangsa dan mendukung situasi kondusif bagi pembangunan bangsa. Dengan demikian penelitian ini pun terkait dengan proses untuk menciptakan dan mengoptimalkan upaya penyelenggaraan pertahanan negara yang kuat dan tangguh khususnya dalam ranah pertahanan nirmiliter.

2.1.8 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu diajukan pada bagian ini untuk semakin menegaskan dan menjadi pembanding terkait dengan tema penelitian yang diangkat peneliti.

Penelitian pertama yang diajukan di sini adalah sebuah disertasi dengan judul Islam dan Kebudayaan Sasak (Studi tentang Akulturasi Nilai-nilai Islam Ke Dalam Kebudayaan Sasak) yang ditulis oleh H. Ahmad Abd Syakur (2002) pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kaligaja. Dalam disertasi tersebut dijelaskan bagaimana nilai-nilai agama Islam masuk ke

dalam masyarakat asli suku Sasak yang telah hidup dalam kebudayaan dan kepercayaan beragam (animisme, dinamisme, Budha, Boda dan Hindu). Proses akulturasi nilai-nilai Islam ke dalam kebudayaan Sasak berjalan secara damai dan lancar melalui para tokoh Kyai dan tokoh-tokoh yang berkenan saat itu. Pendidikan menjadi kunci utama dalam proses akulturasi ini. Dari studi tentang akulturasi nilai-nilai Islam ke dalam kebudayaan Sasak ini dapat dipetik suatu teori bahwa: "Semakin banyak kadar pengetahuan dan kesadaran keagamaan (Islam) seseorang atau suatu masyarakat, maka semakin berkurang kadar kefanatikan dan keterkaitannya dengan suatu aliran atau adat istiadat tertentu. Semakin tinggi kadar pemahaman keagamaan (Islam) dan ketakwaan yang berkembang dalam suatu masyarakat, semakin tinggi pula nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut".

Penelitian kedua adalah artikel yang ditulis oleh Melly G. Tan dengan judul *Unity in Diversity : Ethnic Chinese and NationBuilding in Indonesia*. Artikel ini dimuat dalam sebuah buku berjudul *Ethnic Realtions And Nation Building in Southeast Asia ; The Case of the Ethnic Chinese* dengan editor Leo Suryadinata (2004). Dalam tulisannya, Tan mendalami sebuah persoalan yang berangkat dari peristiwa reformasi khususnya periode Mei 1998. Gerakan anti Cina menjadi salah satu isu utama pada saat itu. China dipandang sebagai sebuah etnis yang mengancam bangsa. Tulisan Tan menggagas bagaimana kiprah etnis China dalam keterpurukan dan traumanya mencoba bangkit kembali dan menunjukkan identitasnya sebagai salah satu bagian etnis bangsa Indonesia. Bukan hal mudah bagi etnis China untuk mendapat tempat dan kepercayaan di tengah situasi dan dinamika sosial yang sedemikian rupa.

Penelitian ketiga adalah sebuah tulisan dari Zainuddin Daulay yang tertuang dalam buku berjudul *Toleransi Beragama di Daerah Rawan Konflik* (2016) yang dikeluarkan oleh Badan Litbang dan Ditlat Kementerian Agama RI. Dalam tulisannya, Daulay mendeskripsikan perihal toleransi di Bogor dalam dua isu utama yaitu radikalisasi dan kristenisasi. Hasil penelitiannya menemukan perihal konsep toleransi yang dianut warga

Bogor yaitu tidak saling mengganggu dan penghargaan terhadap martabat manusia. Selain itu, peneliti juga menyebutkan pilar-pilar yang menjaga toleransi di Bogor yaitu kearifan lokal Bogor dalam rupa semangat tradisi Sunda “Asah, Asih, Asuh”. Di samping itu adanya organisasi lintas agama seperti BASOLIA (Badan Sosial Lintas Agama) dan FKUB Bogor (Forum Kerukunan Umat Beragama) turut memberikan andil positif dalam menjaga toleransi di Bogor.

Penelitian ketiga yang dipakai adalah sebuah tulisan dari Casram, seorang dosen Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan tema Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural (2016). Tulisan ini dimuat dalam Jurnal Ilmiah agama dan sosial budaya UIN pada edisi Juli 2016, Volume II. Dalam penelitiannya, lewat pendekatan fenomenologis, ia mengangkat konsep *epoche* sebagai modal mental dalam membangun toleransi beragama. Beragam rumusan tentang tipologi hubungan antar agama, seperti eksklusifisme, inklusifisme, pluralisme, dst., lazim dikemukakan untuk membawa keragaman ini ke tahap dialog harmonis agama yang lebih jauh. Tulisan ini mengingatkan agar penghayatan dan praktik keagamaan tidak berhenti pada tahap klaim eksklusifisme (“Aku”) yang berujung pada hubungan personal dengan Tuhan (soliter), tidak juga pada tahap inklusivisme (“Kamu”) dengan perhatiannya pada perekrutan dukungan teologis atau ideologis (solidaritas), melainkan juga tahap keterbukaan (“Kita”) dimana penghayatan religius atas nilai-nilai kemanusiaan mendapat penekanan (humanis).

Tabel 2.3 Perbandingan Penelitian Terdahulu

Peneliti & Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbandingan
Islam dan Kebudayaan Sasak (Studi tentang Akulturasi Nilai-nilai Islam Ke Dalam Kebudayaan Sasak) H. Ahmad Abd Syakur (2002) Disertasi pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta	Pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Proses akulturasi berhasil dilakukan dengan damai dan lancar melalui media pendidikan. Peranan tokoh (Tuan Guru dan Tokoh Masyarakat) menjadi juru kunci dalam proses akulturasi. Proses difusi menjadi kunci untuk proses diterimanya nilai dan orang Islam dalam budaya dan masyarakat Sasak. Terdapat faktor pendukung proses akulturasi diantaranya : pendidikan dalam keluarga dan Mileu, organisasi Islam yang subur, sejarah PKI, pengaruh seni budaya, pers dan pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> Lokusnya berbeda. Toleransi dan damai tidak dibahas dalam penelitian ini secara spesifik.
<i>Unity in Diversity : Ethnic Chinese and NationBuilding in Indonesia</i> Melly G. Tan Jurnal pada Institute of Southeast Asian Studies, Singapore	Pendekatan kualitatif dengan metode anthropologi, etnografi dan hukum	Bangkitnya etnis China dari rasa trauma pada era reformasi. Kebangkitan ini lebih karena kondisi politis, munculnya organisasi, gerakan dan tokoh yang mengangkat kembali etnis China seperti FKKB, Perhimpunan Indonesia Keturunan Tionghoa, Kwik Kian Gie, Megawati, Chandra Setiawan.	<ul style="list-style-type: none"> Nuansa politis sangat kental. Tidak berbicara soal perdamaian dan toleransi. Tidak dijumpai adanya sebuah upaya penyembuhan pengalaman traumatik.
Isu Radikalisasi dan Kristenisasi Diantara Pilar-Pilar Toleransi di Kota Bogor Zainuddin Daulay (2016) Jurnal pada Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI	Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif	Toleransi tumbuh karena adanya faktor pendukung yang disebut dengan pilar-pilar toleransi di kota Bogor yaitu organisasi (FKUB dan BASOLIA) dan nilai kearifan lokal Sunda	<ul style="list-style-type: none"> Lokusnya sama yaitu di Bogor Tidak dijumpai bagaimana upaya menjalin dialog dalam menumbuhkan toleransi di Bogor
Membangun Sikap Toleransi Beragama Dalam Masyarakat Plural Casram (2016) Jurnal pada UIN Bandung	Pendekatan kualitatif dengan metode Fenomenologi	Sikap Epoche menjadi dasar utama dalam membangun mentalitas sikap toleransi	Tidak memberikan sebuah gambaran bagaimana praksis membangun sikap epoche tersebut.
Tradisi Cap Go Meh di Kota Bogor Studi Pengembangan Budaya Damai Dalam Perspektif Multikulturalisme	Pendekatan kualitatif dengan metode dekritif	Tujuan penelitian ini hendak menganalisis nilai-nilai damai dan toleransi yang muncul dalam akulturasi budaya Cap Go Meh di Kota Bogor	Lokus penelitiannya di Kota Bogor. Fokus penelitiannya adalah akulturasi budaya Cap Go Meh yang mampu mewujudkan budaya damai dan toleransi pada dua daerah kontras (Suryakencana sebagai daerah mayoritas Tionghoa dengan Empang sebagai daerah Islam dan Arab).

Sumber : Diolah oleh Peneliti

2.2 Kerangka Pemikiran

